

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pengajuan Rancangan APBD Terancam Molor

Gambir, Warta Kota

Pimpinan DPRD DKI Jakarta minta dimaklumi karena molornya pembahasan anggaran untuk tahun 2020. Sebab pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 masih bergulir di Komisi B dan C, sementara penyerahan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) harus dilakukan pada 1 Desember 2019.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, penyerahan dokumen R-APBD 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terancam molor karena mempertimbangkan tahun politik 2019. Pada Agustus 2019 lalu, lembaga legislatif mengalami masa transisi kepengurusan anggota DPRD baru, antara periode 2014-2019 dengan 2019-2024.

"Jadi, Kemendagri mungkin karena pertimbangannya ini tahun politik di mana pelantikan kami pun mundur menjadi 26 Agustus. Intinya ini tahun pengecualianlah," kata Zita pada Rabu (13/11).

Karena itu, Zita berencana mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemendagri. Menurut dia, bila perpanjangan waktu disetujui maka sanksi administrasi berupa penundaan hak keuangan bisa dihindari.

Sebab eksekutif dan legislatif lebih dulu memberi penjelasan melalui surat resmi kepada Kemendagri. "Nggaklah (kena sanksi) karena kami bersurat dan kami menjelaskan kondisinya, dan ini memang tahun politik karena ada pemilihan dan sebagainya. Jadi kami minta perpanjangan waktu," imbuhnya.

"Yang pasti (MoU anggaran dengan eksekutif) tetap tahun ini," tambahnya. Untuk mengejar waktu yang ditetapkan, kata Zita, para anggota Komisi di DPRD dengan eksekutif menggelar rapat dari pagi hingga malam hari. Selain karena adanya transisi anggota DPRD, kata dia, molornya pembahasan anggaran juga karena hambatan komunikasi serta sinergitas.

"Mungkin baru kenal-

an antara anggota DPRD yang baru dengan eksekutif. Saya selaku Koordinator Komisi E sudah sampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bahwa sebelum rapat dimulai kami sudah terima bahan-bahan yang akan dibahas, supaya pembahasan lebih maksimal lagi," ungkapnya. (faf)

Yang pasti (MoU anggaran dengan eksekutif) tetap tahun ini.

Zita Anjani
Wakil Ketua DPRD
DKI Jakarta